



MEKANISME DAN TAHAPAN PENGUKURAN IRB PD

INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH
DI PROVINSI JAWA BARAT

STRATEGIC TRANSFORMATION UNIT
PROVINSI JAWA BARAT

MEKANISME DAN TAHAPAN PENGUKURAN INDEKS RB PERANGKAT DAERAH

MEKANISME PELAKSANAAN

PENGUKURAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

DILAKSANAKAN OLEH ASESOR
PERANGKAT DAERAH



PEMENUHAN DOKUMEN
SESUAI STANDAR DOKUMEN

HASIL PENILAIAN MANDIRI DISAMPAIKAN
KEPADA TIM EVALUASI



VALIDASI CAPAIAN DAMPAK TEMATIK

TIM P3DN PEMDA
(APLIKASI KAWANI/BIGBOX)

TIM EVALUASI EKSTERNAL
(TIM INDEPENDEN)

REALISASI PDN

PRAKTEK BAIK



PLENO PENETAPAN NILAI INDEKS RB PERANGKAT DAERAH

VERIFIKASI DAN VALIDASI

MEMASTIKAN DATA SERTA BUKTI DUKUNG YANG DISAMPAIKAN ASESOR PERANGKAT DAERAH TELAH SESUAI DENGAN DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN MELALUI ANALISA DATA MELIPUTI; TELAHAH SEDERHANA, ANALISIS DAN PENGUKURAN, PEMBANDINGAN, ANALISIS LOGIKA PROGRAM DAN SEBAGAINYA



VERIFIKASI RB GENERAL

STU (*STRATEGIC
TRANSFORMATION UNIT*)

LEADING INSTITUTION
(PD PENGAMPU)

RENCANA AKSI

INDIKATOR RB



TAHAPAN PELAKSANAAN

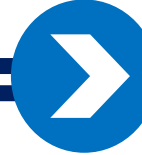
PENGUKURAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI PD KABUPATEN/KOTA

01



1 JULI S.D 31 AGUSTUS
SOSIALISASI JUKLAK, JUKNIS
DAN LAUNCHING
PENGUKURAN IRB PD

02



1 S.D 30 SEPTEMBER
PENILAIAN MANDIRI OLEH
ASESOR PERANGKAT
DAERAH

03

1 S.D 31 OKTOBER
VERIFIKASI DAN VALIDASI
AWAL OLEH TIM EVALUASI
INTERNAL

1 S.D 30 NOVEMBER
PENGUMUMAN NILAI
SEMENTARA



1 s.d 31 DESEMBER
PERBAIKAN HASIL
VERIFIKASI AWAL OLEH
ASESOR PD

06



1 S.D 28 FEBRURAI
PLENO PENETAPAN NILAI
AKHIR DAN
PENGUMUMAN/AWARDING

05



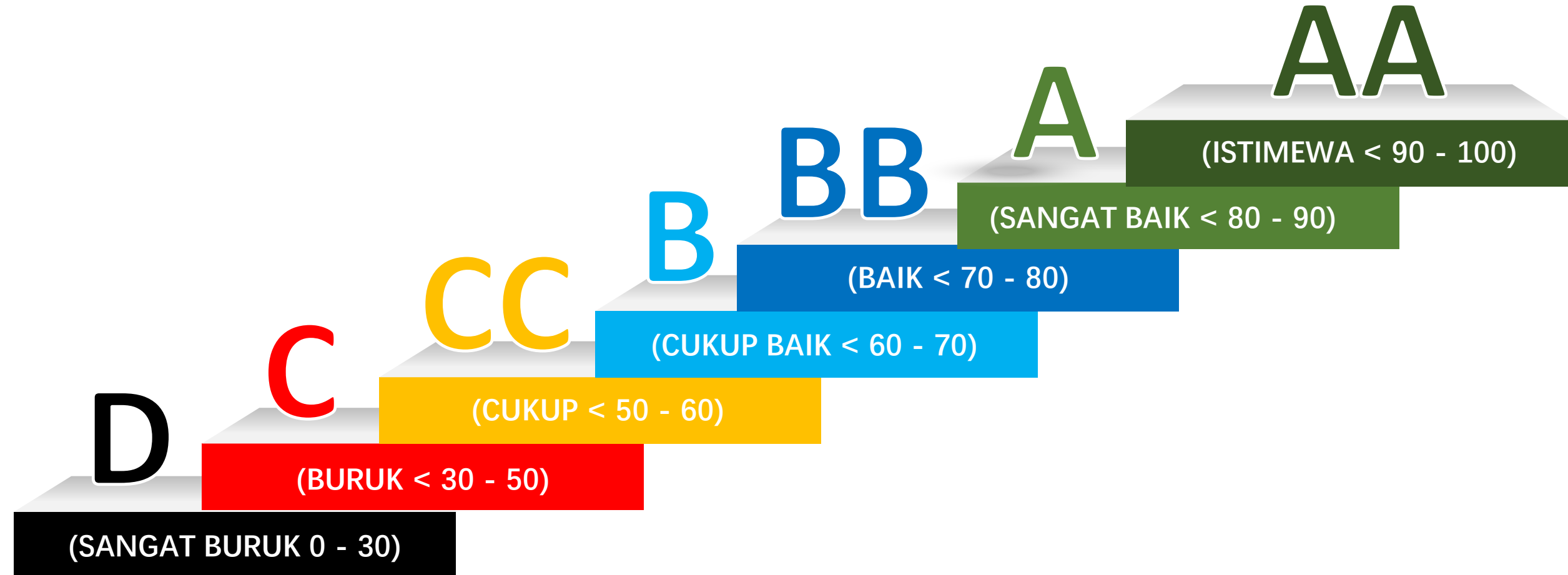
1 S.D 31 JANUARI
VERIFIKASI AKHIR OLEH TIM
EVALUASI INTERNAL DAN
EKSTERNAL PEMDA

04



KATEGORI INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

Laboratorium Transformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



INSTRUMEN PENGUKURAN INDEKS RB PERANGKAT DAERAH

BOBOT INDIKATOR PEMBENTUK REFORMASI BIROKRASI GENERAL PERANGKAT DAERAH

Laboratorium Transformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



INDIKATOR RB GENERAL PERANGKAT DAERAH



CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

NILAI SAKIP PD	6
CAPAIAN IKU PD	4
TLHP BPK DAN APIP	4
LRA APBD	4
INDEKS BERAKHLAK	4
NILAI SKM	4
INDEKS TATA KELOLA PBJ	4
INDEKS PROFESIONALITAS ASN	4
JUMLAH	34



CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

TINGKAT PENERAPAN SPBE	6
TINDAKLANJUT SP4N LAPOR	4
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	4
INDEKS REFORMASI HUKUM	4
TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	4
TINGKAT PEMBANGUNAN ZI	4
JUMLAH	26



CAPAIAN STRATEGIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

RENCANA AKSI RB GENERAL	2
CAPAIAN RENCANA AKSI	3
JUMLAH	5

BOBOT RB GENERAL
65 POINT



INDIKATOR RB GENERAL KECAMATAN



CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

NILAI SAKIP PD	6
CAPAIAN IKU PD	4
TLHP BPK DAN APIP	4
LRA APBD	4
INDEKS BERAKHLAK	4
NILAI SKM	4
INDEKS TATA KELOLA PBJ	4
INDEKS PROFESIONALITAS ASN	4
JUMLAH	34



CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

TINGKAT PENERAPAN SPBE	6
TINDAKLANJUT SP4N LAPOR	4
TINGKAT IMPLEMENTASI PATEN/ EVALUASI SINERGITAS KECAMATAN	4
EVALUASI BINWAS Pemerintahan Desa/Kel	4
TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	4
TINGKAT PEMBANGUNAN ZI	4
JUMLAH	26



CAPAIAN STRATEGIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

RENCANA AKSI RB GENERAL	2
CAPAIAN RENCANA AKSI	3
JUMLAH	5

BOBOT RB GENERAL
65 POINT

SUBSTANSI INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH



CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

NILAI SAKIP PD	6
CAPAIAN IKU PD	4
TLHP BPK DAN APIP	4
LRA APBD	4
INDEKS BERAKHLAK	4
NILAI SKM	4
INDEKS TATA KELOLA PBJ	4
INDEKS PROFESIONALITAS ASN	4
JUMLAH	34



1. INDIKATOR INI BERSIFAT DATA CAPAIAN HASIL. SUMBER DATA CAPAIAN HASIL DIKELUARKAN/RILIS OLEH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU INDIKATOR;
2. ASESOR PERANGKAT DAERAH MENGINPUT NILAI CAPAIAN AKHIR DARI INDIKATOR TERSEBUT BESERTA DOKUMEN BUKTI DUKUNG YANG DIKELUARKAN OLEH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU;
3. APABILA PERANGKAT DAERAH TIDAK MELAKSANAKAN INPUT NILAI, MAKA NILAI AKAN DIINPUTKAN OLEH EVALUATOR. NAMUN AGAR PERANGKAT DAERAH DAPAT MENGUKUR SEJAUHMANA PROGRES CAPAIAN DIUPAYAKAN PERANGKAT DAERAH BERKOOBINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH PENGAMPU TERKAIT NILAI YANG DIKELUARKAN.

SUBSTANSI INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH



CAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

TINGKAT PENERAPAN SPBE	6
TINDAKLANJUT SP4N LAPOR	4
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	4
INDEKS REFORMASI HUKUM	4
TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	4
TINGKAT PEMBANGUNAN ZI	4
JUMLAH	26



1. INDIKATOR INI BERSIFAT *SELF ASSESSMENT* DARI ASESOR PERANGKAT DAERAH. ARTINYA JIKA PERANGKAT DAERAH TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI MAKA NILAI AKAN MENJADI NOL DAN TIM EVALUATOR TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN VERIFIKASI;
2. PENILAIAN MANDIRI OLEH ASESOR PD DILAKUKAN DENGAN MELAKUKAN PEMILIHAN LEVEL JAWABAN SESUAI DENGAN DOKUMEN/EVIDEN YANG DIMILIKI;
3. EVALUATOR DAPAT MEMBERIKAN PENILAIAN SESUAI DENGAN JAWABAN ASESOR ATAU MENURUNKAN LEVEL JAWABAN ATAU MENINGKATKAN LEVEL JAWABAN, SEPANJANG MENURUT STANDAR DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN TELAH MEMENUHI ATAU BELUM MEMENUHI;
4. EVALUATOR AGAR MENYUSUN DAN MENETAPKAN STANDAR DOKUMEN/EVIDEN YANG DIPERSYARATKAN SEBAGAI PEDOMAN DAN MENJAGA PENYAMAAN PERSEPSI DIANTARA PARA EVALUATOR;

SUBSTANSI INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH



CAPAIAN STRATEGIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

RENCANA AKSI RB GENERAL	2
CAPAIAN RENCANA AKSI	3
JUMLAH	5



1. DOKUMEN RECANA AKSI RB GENERAL BERDASARKAN DATA CASCADING KINERJA/PERJANJIAN KINERJA/SASARAN KINERJA PEGAWAI PADA LINGKUP SEKRETARIAT PD YANG TELAH DITETAPKAN;
2. CAPAIAN RENCANA AKSI BERDASARKAN DATA CAPAIAN KINERJA (CAPKIN) LINGKUP SEKRETARIAT PD YANG DITETAPKAN SETIAP BULAN/ TRIWULAN/ SEMESTER/ TAHUNAN;

CAPAIAN STRATEGIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN RB

RENCANA AKSI RB TEMATIK	2
CAPAIAN RENCANA AKSI	3
JUMLAH	5



1. DOKUMEN RECANA AKSI RB TEMATIK BERDASARKAN DATA CASCADING KINERJA/PERJANJIAN KINERJA/SASARAN KINERJA PEGAWAI PADA LINGKUP BIDANG TEKNIS PD YANG DITETAPKAN;
2. CAPAIAN RENCANA AKSI BERDASARKAN DATA CAPAIAN KINERJA (CAPKIN) LINGKUP BIDANG TEKNIS PD YANG DITETAPKAN SETIAP BULAN/ TRIWULAN/ SEMESTER/ TAHUNAN;

INDIKATOR PEMBENTUK REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PERANGKAT DAERAH



STRATEGI MEMBANGUN RB TEMATIK

TERSEDINYA DOKUMEN
RENCANA AKSI RB TEMATIK

IMPLEMENTASI DOKUMEN
RENCANA AKSI RB TEMATIK

2 POIN

3 POIN

5 POINT

FOCUS

“Pelaksanaan RB Tematik berfokus pada Implementasi Pelaksanaan Belanja PDN dan Implementasi pada Capaian Kinerja Organisasi melalui Pelaksanaan Praktek Baik dengan Isu Strategis terkait Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Peningkatan Investasi, Pengendalian Laju Inflasi, dan kinerja core bisnis perangkat daerah lainnya”

BOBOT RB
TEMATIK 35 POINT

CAPAIAN DAMPAK REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

REALISASI BELANJA PDN DALAM
BELANJA DAERAH PD

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
(PRAKTEK BAIK CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN PD)

10 POIN

20 POIN

30 POIN

SUBSTANSI INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH



CAPAIAN DAMPAK REFORMASI
BIROKRASI TEMATIK

REALISASI BELANJA PDN DALAM
BELANJA DAERAH PD

10 POIN



INPUT NILAI REALISASI BELANJA PDN DALAM BELANJA DAERAH PERANGKAT DAERAH YANG DIPEROLEH BERDASARKAN DATA PADA APLIKASI KAWANI DAN ATAU APLIKASI LKPP BIGBOX ATAS INPUT NILAI PADA PENCATATAN TRANSAKSI PBJ DI APLIKASI SPSE;

CAPAIAN DAMPAK REFORMASI
BIROKRASI TEMATIK

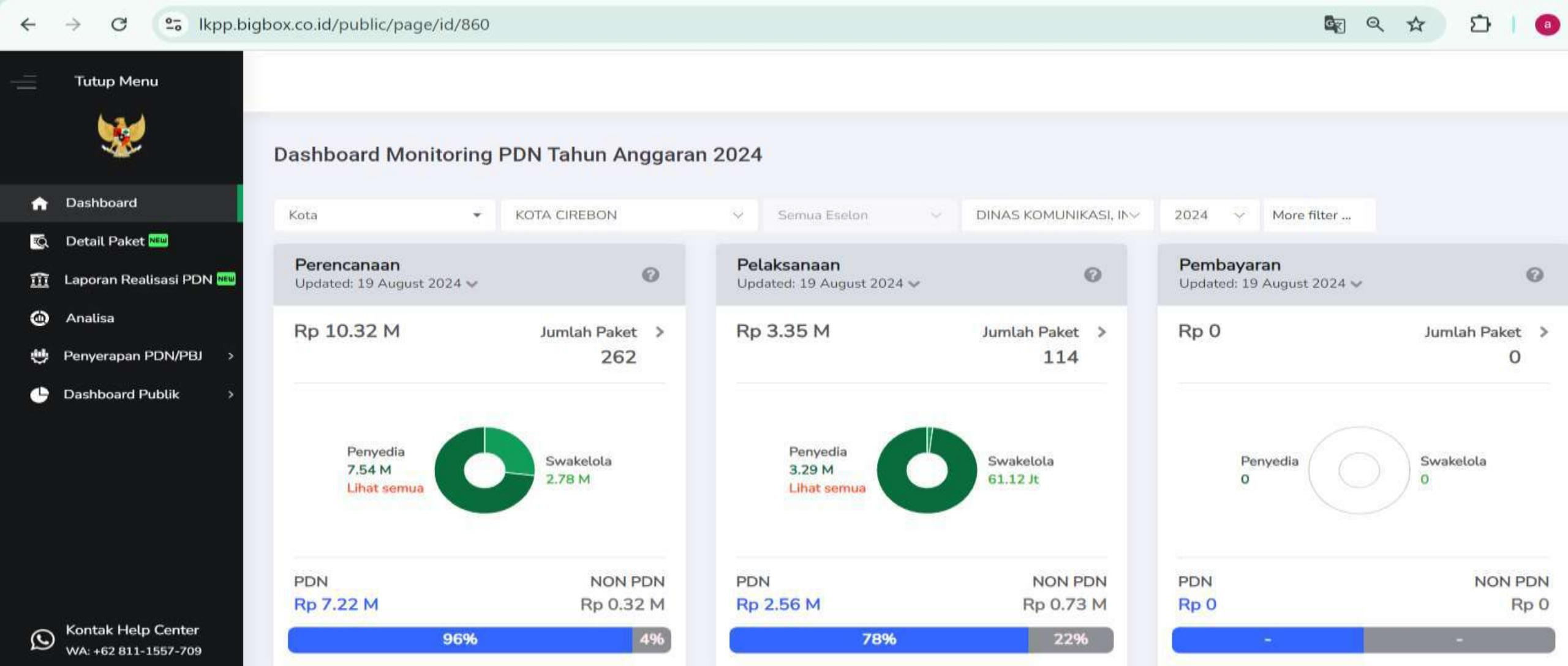
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
(PRAKTEK BAIK PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN)

20 POIN



“PRAKTEK BAIK/INOVASI PERANGKAT DAERAH BERUPA: PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI CORE BISNIS PERANGKAT DAERAH SEPERTI; PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENURUNAN STUNTING, PENGENDALIAN INFLASI, PENINGKATAN INVESTASI, PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DAN KINERJA LAINNYA YANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH/ PERANGKAT DAERAH“

REALIASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA BELANJA PERANGKAT DAERAH



Data Capaian Realisasi Penggunaan PDN dapat diakses melalui: <https://lkpp.bigbox.co.id/public>



PEMENUHAN DOKUMEN PRAKTEK BAIK/INOVASI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

-- ToA --

TERUKUR, OBJEKTIF, AKUNTABEL



DOKUMEN PRAKTEK BAIK DISAMPAIKAN BERUPA “PAPARAN/MAJALAH ELEKTRONIK DAN VIDEO YOUTUBE” YANG MEMBERIKAN GAMBARAN PRAKTEK BAIK DENGAN SUBTANSI MATERI POKOK SEBAGAI BERIKUT:

- 1. PERMASALAHAN ORGANISASI/PUBLIK YANG INGIN DISELESAIKAN DAN WAKTU PELAKSANAANNYA**
- 2. SASARAN/TARGET YANG PENERIMA MANFAAT (*STAKEHOLDERS*) INTERNAL ATAU EKSTERNAL PERANGKAT DAERAH**
- 3. PERAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP CAPAIAN IKU PERANGKAT DAERAH**
- 4. PERAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP CAPAIAN IKU PEMERINTAH DAERAH YANG DIAMPU**
- 5. DATA JUMLAH PENERIMA MANFAAT (CAPAIAN DAMPAK KEMANFAATAN) PRAKTEK BAIK/INOVASI**
- 6. SISTEM INFORMASI YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN INOVASI (JIKA ADA)**

CONTOH PRAKTEK BAIK/INOVASI PERANGKAT DAERAH



CSR Jabar Caang: bersama Menerangi Jawa Barat

Jabar Caang merupakan Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait penyambungan listrik terhadap masyarakat tidak mampu yang telah dilaksanakan sejak 2001 sampai dengan 2018 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mendukung peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa Barat

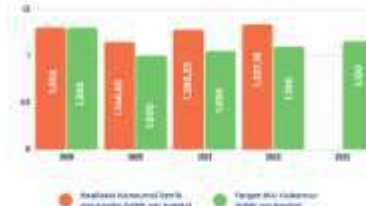
melalui pembangunan akses listrik bagi masyarakat tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain menggunakan dana yang bersumber dari APBD juga bekerjasama dengan badan usaha melalui mekanisme Corporate social responsibility (CSR) yang disebut CSR Jabar Caang. CSR Jabar Caang telah dilaksanakan sejak 2019 sampai dengan 2022 dengan total penyambungan listrik kepada masyarakat tidak mampu sebanyak 54.539 (lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) satuan sambungan yang memberikan 108 MWh CSR Jabar Caang.

Waktu Pelaksanaan

Program Jabar Caang melalui skema APBD telah dilakukan sejak Tahun 2001 sampai dengan 2018 serta melalui skema CSR Jabar Caang Sejak Tahun 2019 sampai dengan 2022.



*Sifatnya jurnalistik, bukan laporan pemerintah atau organisasi. ©



*Sifatnya jurnalistik, bukan laporan pemerintah atau organisasi. ©

Cakupan Dampak Ke Publik

Sejak Tahun 2019 hingga tahun 2022 melalui CSR Jabar Caang telah membangun akses listrik kepada masyarakat tidak mampu sebanyak 54.539 (lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan) satuan sambungan. Dengan dilaksanakannya Program Jabar Caang baik skema APBD dan CSR, meningkatkan Capaian Rasio Elektrifikasi Jawa Barat sampai dengan Triwulan I 2023 yaitu 99,96%. Serta mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Gubernur yakni Konsumsi listrik per Kapita dengan capaian di Tahun 2022 sebesar 1.337 kWh/Kapita dan capaian Indikator Kinerja Utama Urahan Kerja yakni Jumlah Konsumen Jabar Caang baik skema APBD dan CSR, meningkatkan Capaian Rasio Elektrifikasi Jawa Barat sampai dengan Triwulan I 2023 yaitu 99,96%. Serta mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Gubernur yakni Konsumsi listrik per Kapita dengan capaian di Tahun 2022 sebesar 1.337 kWh/Kapita dan capaian Indikator Kinerja Utama Urahan Kerja yakni Jumlah Konsumen Jabar Caang baik skema APBD dan CSR, meningkatkan Capaian Rasio Elektrifikasi Jawa Barat sampai

Penghargaan

CSR Jabar Caang telah meraih pada Surat Pencatatan Capaian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ECD0202311871 tanggal 9 Februari 2023



PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari program CSR Jabar Caang adalah masyarakat tidak mampu yang belum memiliki listrik secara mandiri di Jawa Barat.



Akses Listrik Rumah Tangga

Untuk mendukung sasaran peningkatan akses listrik ke-3 Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, yaitu meningkatkan infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu konsumsi listrik per kapita.

Stakeholders

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 54 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, pelaksanaan akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan daya dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintah secara kolaboratif yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan serta media massa, dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana teknis Program Jabar Caang.



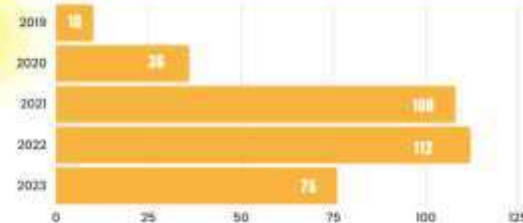
Stakeholders



Dengan berkembangnya Birokrasi 4.0 yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kolaborasi dengan skema Pemerintah. Antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi, Masyarakat dan Media Massa, menjadi suatu kebutuhan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program bagi masyarakat tidak mampu melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) di Jawa Barat ini diantaranya:

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat;
- Badan Usaha Jasa Penunjang Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah (Instalstik);
- Lembaga Inspeksi Teknik - Tegangan Rendah (IUT-TR) dan Pelaku usaha Mitra CSR.



*Sifatnya jurnalistik, bukan laporan pemerintah atau organisasi. ©

VIDEO YouTube PRAKTEK BAIK

JABAR CAANG

<https://www.youtube.com/watch?v=CBipNxD0gPk>

<https://www.youtube.com/watch?v=JJEitK-cjHw>

Surabi 2.0 Jawa Barat

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Jawa Barat terkoneksi dengan Pengukuran Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dengan pengukuran RB General dan RB Tematik.



MANUAL PENGUNAAN APLIKASI SURABI 2.0

SURABI 2.0 Jabar

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat

Sebuah sistem informasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang memberikan dampak kepada Publik.



AKSES APLIKASI SURABI 2.0

AKSES SISTEM PENGUKURAN REFORMASI BIROKRASI TERINTEGRASI (SURABI 2.0)



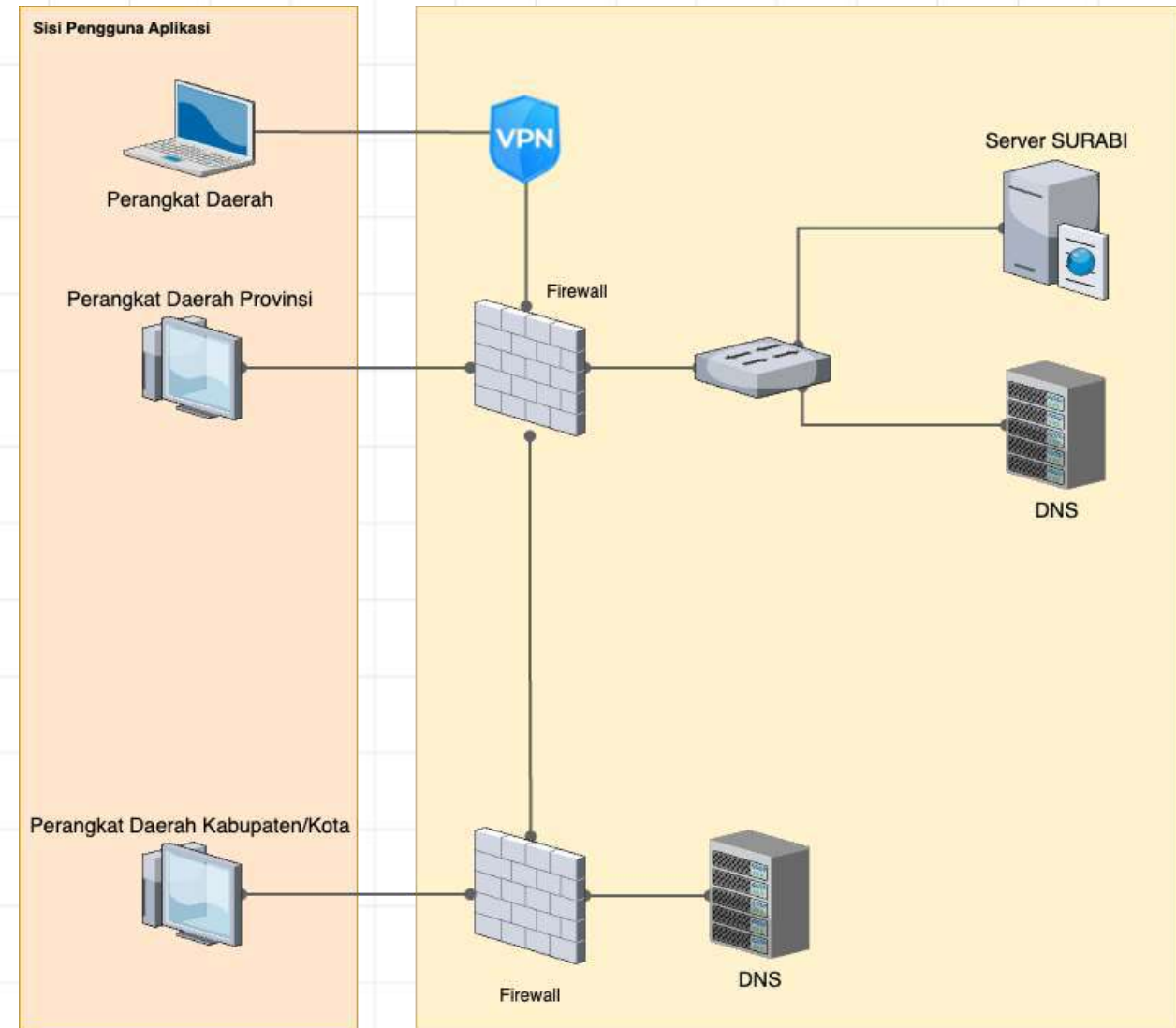
KETENTUAN AKSES APLIKASI:

1. Alamat Portal SURABI:

<https://surabi.jabarprov.go.id>;

2. Hanya dapat diakses menggunakan Jaringan Intranet Pemerintah (JIP) yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten/kota yang terintegrasi dengan Jaringan Intranet Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

3. Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keamanan data dan implementasi SPBE guna meningkatkan capaian nilai Indeks SPBE Pemeirntah Daerah.



ASSESSMENT KESIAPAN PENERAPAN APLIKASI SURABI 2.0 MELALUI JARINGAN INTRANET PEMERINTAH



INSTRUMEN ASSESSMENT JIP	KOTA CIREBON	KAB CIREBON
APAKAH KABUPATEN/KOTA SAUDARA TELAH MENERIMA JARINGAN INTRANET DARI DISKOMINFO PROVINSI?	YA	YA
DIMANA LOKASI TITIK TURUNNYA JARINGAN INTRANET DARI DISKOMINFO PROVINSI?	DATA CENTER	DATA CENTER
APAKAH JARINGAN INTRANET DARI DISKOMINFO PROVINSI SUDAH TERINTEGRASI DENGAN JARINGAN INTRANET YANG DISEDIAKAN OLEH DISKOMINFO KABUPATEN/KOTA?	YA	TIDAK
BAGAIMANA SKEMA PENYELENGGARAAN JARINGAN DI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA?	TERPUSAT DI DISKOMINFO	TERPUSAT DI DISKOMINFO
APAKAH JARINGAN INTRANET DI KABUPATEN/KOTA SUDAH MENJANGKAU HINGGA KECAMATAN DAN KELURAHAN?	YA	YA
APAKAH APLIKASI SURABI DAPAT DIAKSES MELALUI JARINGAN INTRANET YANG DISEDIAKAN OLEH DISKOMINFO KABUPATEN/KOTA?	YA	YA
APAKAH APLIKASI SURABI DAPAT DIAKSES MELALUI JARINGAN INTRANET YANG TERSEDIA DI KANTOR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA?	YA	YA
JIKA JARINGAN BELUM TERPUSAT, BAGAIMANA CARA PENGGUNA (PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN/KELURAHAN) DAPAT MENGAKSES APLIKASI PADA JARINGAN INTRANET (SURABI.JABARPROV.GO.ID)?	SUDAH BISA DILAKSANAKAN PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	SUDAH BISA DILAKSANAKAN PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA



SURABI 2.0 Jabar

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat

Sebuah sistem informasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang memberikan dampak kepada Publik



SURABI 2.0 Jabar

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat

Sebuah sistem informasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang memberikan dampak kepada Publik.



DASHBOARD APLIKASI SURABI 2.0

DASHBOARD APLIKASI SURABI 2.0



SURABI

surabi.jabarprov.go.id/home

SURABI 2.0

Search

Pedoman


Dashboard

Halo User

25 Hari 13 Jam 11 Menit

Surabi 2.0 !

Surabi 2.0 adalah Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi di Jawa Barat dengan update terbaru 2023 !



Aktivitas Surabi 2023

- 21 Apr ● Penyesuaian Admin Daerah
- 30 Mei ● Pengisian RB General
- 10 Jun ● Setting Evaluator
- 20 Jun ● Evaluasi RB General
- 31 Apr ● Penyesuaian Admin Daerah
- 30 Mei ● Pengisian RB General
- 10 Jun ● Setting Evaluator
- 20 Jun ● Evaluasi RB General

Progress Tracker

Capaian Sasaran Strategis	100%
Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	0%
Capaian Strategis Pelaksanaan RB General	100%
Strategi Membangun RB Tematik	100%
Capaian Dampak RB Tematik	100%

Lihat Instrumen >

LKE RB General

Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi

LKE RB Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik Jawa Barat

Praktik Baik

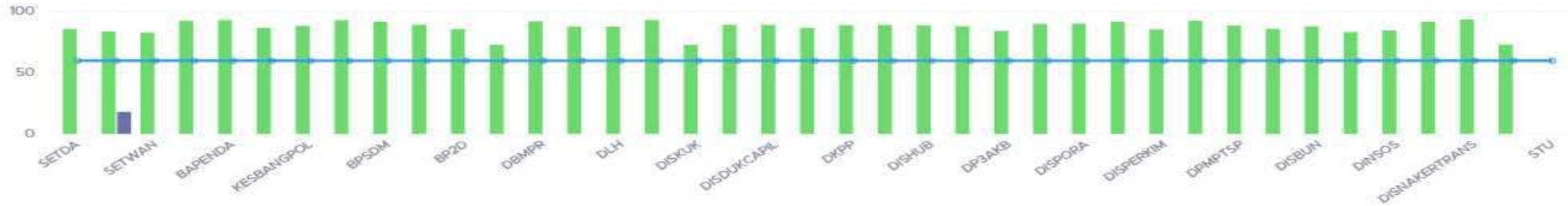
Digitalisasi Administrasi Core Business Organisasi

Login: User - perangkat

DASHBOARD APLIKASI SURABI PADA AKUN EVALUATOR & PD



Indeks RB Perangkat Daerah



NILAI RB PERANGKAT DAERAH

10 entries per page

Search...

Perangkat	RB General	RB TEMATIK	N_SA	N_VER
Inspektorat Daerah	54.02 ver - 0.00	30.00 ver - 18.02	84.02	18.02
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	53.01 ver - 0.00	33.00 ver - 0.00	86.01	0.00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat	51.77 ver - 0.00	31.20 ver - 0.00	82.97	0.00
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	59.76 ver - 0.00	33.00 ver - 0.00	92.76	0.00
Badan Pendapatan Daerah	60.32 ver - 0.00	33.00 ver - 0.00	93.32	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53.98 ver - 0.00	33.00 ver - 0.00	86.98	0.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.57 ver - 0.00	33.00 ver - 0.00	88.57	0.00
Badan Kepegawaian Daerah	60.29 ver - 0.00	33.00 ver - 0.00	93.29	0.00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	59.59 ver - 0.00	32.43 ver - 0.00	92.02	0.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.49 ver - 0.00	32.00 ver - 0.00	89.49	0.00

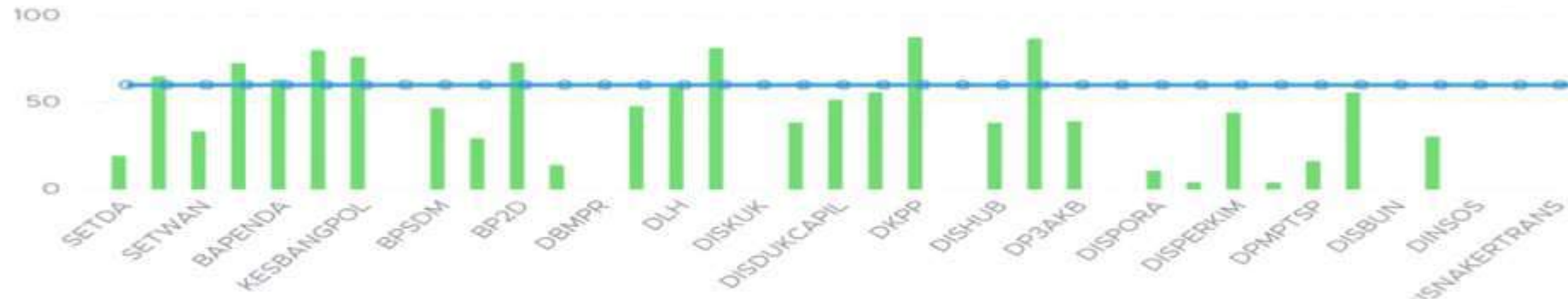
PROGRESS INPUT SELF ASSESMENT IRB PD PROV. JAWA BARAT



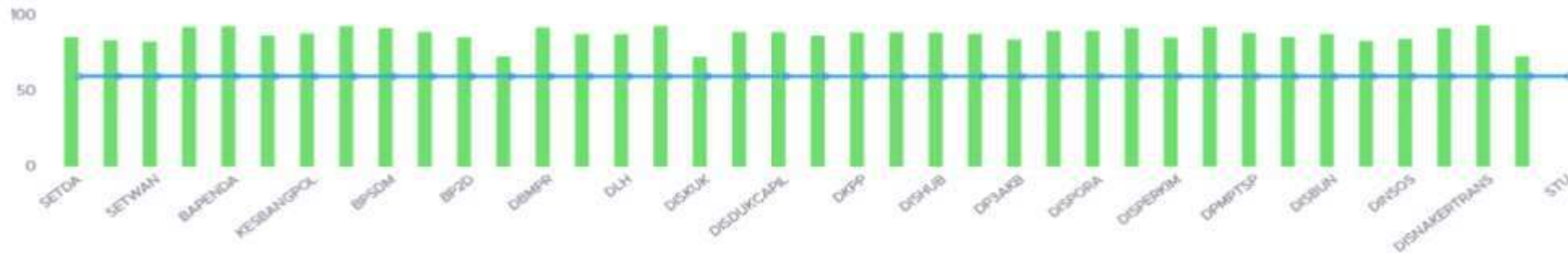
Indeks RB Perangkat Daerah



**PROGRESS
INPUT H-2
PENUTUPAN**



**PROGRESS
INPUT H-1
PENUTUPAN**



**PROGRESS
INPUT HARI H
PENUTUPAN**

SURABI 2.0 Jabar

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat

Sebuah sistem informasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang memberikan dampak kepada Publik.



LEMBAR KERJA EVALUASI ASESOR PD

PENGISIAN INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH



CORE

Dashboards

GENERAL

Reformasi Birokrasi

Lembar Kerja Evaluasi

Lembar Hasil Evaluasi

PERANGKAT DAERAH

Profile PD

SETTING

Pengaturan Akun

Logout

Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Silahkan klik instrumen yang akan dipenuhi!

Lembar Kerja Evaluasi

RB GENERAL

Capaian Sasaran Strategis

24 Indikator Belum Terisi

RB GENERAL

Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB

94 Indikator Belum Terisi

RB GENERAL

Capaian Strategis Pelaksanaan RB General

2 Indikator Belum Terisi

RB TEMATIK

Strategi Membangunan RB Tematik

2 Indikator Belum Terisi

RB TEMATIK

Capaian Dampak RB Tematik

6 Indikator Belum Terisi

PENGISIAN INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH



Capaian Sasaran Strategis

Silahkan pilih sub indikator pada instrumen Capaian Sasaran Strategis!

☰ Nilai SAKIP Perangkat Daerah

4 Indikator Belum Terisi

☰ Capaian IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

2 Indikator Belum Terisi

☰ Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)

2 Indikator Belum Terisi

☰ Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah

2 Indikator Belum Terisi

☰ Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK

1 Indikator Belum Terisi

☰ Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

3 Indikator Belum Terisi

☰ Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah

6 Indikator Belum Terisi

☰ Indeks Profesionalitas ASN

4 Indikator Belum Terisi

PENGISIAN INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH



CORE

Dashboards

GENERAL

Reformasi Birokrasi

PERANGKAT DAERAH

Profile PD

SETTING

Pengaturan Akun

Logout

Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB

Silahkan pilih sub indikator pada instrumen Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB!

Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah

33 Indikator Belum Terisi

Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

1 Indikator Belum Terisi

Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah

40 Indikator Belum Terisi

Indeks Reformasi Hukum (Nilai Kualitas Produk Hukum) Perangkat Daerah

7 Indikator Belum Terisi

Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)

5 Indikator Belum Terisi

Tingkat Digitalisasi Arsip

8 Indikator Belum Terisi

PENGISIAN INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH



Capaian Strategis Pelaksanaan RB General

Silahkan pilih sub indikator pada instrumen Capaian Strategis Pelaksanaan RB General!

☰ Rencana Aksi Pembangunan RB General

1 Indikator Belum Terisi

☰ Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General

1 Indikator Belum Terisi

Strategi Membangun RB Tematik

Silahkan pilih sub indikator pada instrumen Strategi Membangun RB Tematik!

☰ Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik

1 Indikator Belum Terisi

☰ Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik

1 Indikator Belum Terisi

1. RENCANA AKSI RB GENERAL DIAMBIL DARI RENCANA KERJA/SKP/PK/OUTPUT SUB KEGIATAN DARI LINGKUP SEKRETARIAT PD
2. TINGKAT IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB GENERAL DIAMBIL DARI CAPAIAN KINERJA LINGKUP SEKRETARIAT PD

1. RENCANA AKSI RB TEMATIK DIAMBIL DARI RENCANA KERJA/SKP/PK/OUTPUT SUB KEGIATAN DARI LINGKUP BIDANG TEKNIS
2. TINGKAT IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB GENERAL DIAMBIL DARI CAPAIAN KINERJA LINGKUP BIDANG TEKNIS

PENGISIAN INDIKATOR EVALUASI PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH



CORE

Dashboards

GENERAL

Reformasi Birokrasi

PERANGKAT DAERAH

Profile PD

SETTING

Pengaturan Akun

Logout

Capaian Dampak RB Tematik

Silahkan pilih sub indikator pada instrumen Capaian Dampak RB Tematik!

☰ Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1 Indikator Belum Terisi

☰ Capaian Kinerja Core Business Organisasi

5 Indikator Belum Terisi

INSTRUMEN EVALUASI INDIKATOR PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH



CORE

Dashboards

GENERAL

Reformasi Birokrasi

PERANGKAT DAERAH

Profile PD

SETTING

Pengaturan Akun

Logout

Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah

NILAI : 49.74

Lembar Kerja Evaluasi

1.1. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses .

37.67 >

1.2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan .

85.71 v

1.3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral .

50.00 v

1.1. Tingkat Kematangan
Kapabilitas Proses

1.2. Tingkat Kematangan
Kapabilitas Layanan

1.3. Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

Simpan

SELF ASSESSMENT EVALUASI INDIKATOR PELAKSANAAN RB PERANGKAT DAERAH



SURABI 2.0

Tahun 2024

Pedoman >



CORE

Dashboards

GENERAL

Reformasi Birokrasi

PERANGKAT DAERAH

Profile PD

SETTING

Pengaturan Akun

Logout

1.1. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses .

37.67

Tipe Pertanyaan: A/B/C/D

Telah Memiliki Dokumen Arsitektur SPBE Perangkat Daerah

Nilai : 100

A. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses

keterangan

Pilih Jawaban

A. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, dan Aplikasi

B. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan dan Data dan Informasi

C. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis dan Layanan

D. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis

Hasil Verifikasi :

Belum ada verifikasi

Catatan Verifikasi : Tidak Ada Catatan

Tipe Pertanyaan: Ya/Tidak

Telah Memiliki Dokumen Peta Rencana (Roadmap) Penerapan SPBE Perangkat Daerah

Nilai :

1.1. Tingkat Kematangan
Kapabilitas Proses

1.2. Tingkat Kematangan
Kapabilitas Layanan

1.3. Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

Simpan

Login:

SETDA - perangkat

SURABI 2.0 Jabar

Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Jawa Barat

Sebuah sistem informasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang memberikan dampak kepada Publik.



LEMBAR KERJA EVALUASI EVALUATOR

LKE EVALUATOR



← → ↻ surabi.jabarprov.go.id

SURABI Home Layanan Tentang **Sign In Now**

SURABI
Sign In

adenisumirat017@gmail.com

.....

Ingat Saya

Log In

Lupa password?

https://surabi.jabarprov.go.id/login

Klik **Sign In now** pada laman <https://surabi.jabarprov.go.id>
Dengan menggunakan Jaringan Intranet Pemerintah (JIP)/ wifi kantor Pemprov Jabar

Masukkan **email dan password** sesuai dengan nama masing-masing evaluator
Kemudian **klik tombol Log In**



Pilih **Reformasi Birokrasi**
Kemudian
Pilih **Lembar Kerja Evaluasi**

Reformasi Birokrasi

Lembar Kerja Evaluasi

Praktik Baik

PERANGKAT DAERAH

SETTING











Pengaturan Akun

Logout

Login:
AKHMAD DENI
SUMIRAT.,s.STP.,MM -
evaluator

entries per page

Search..

No	Perangkat Daerah	Singkatan	Σ Verifikasi	Progres	Aksi
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	SETDA	LKE	LKE 1 - %	
2	Inspektorat Daerah	INSPT	LKE	LKE 1 - %	
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat	SETWAN	LKE	LKE 1 - %	
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	LKE	LKE 1 - %	
5	Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA	LKE	LKE 1 - %	
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	LKE	LKE 1 - %	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	LKE	LKE 1 - %	
8	Badan Kepegawaian Daerah	BKD	LKE	LKE 1 - %	
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDM	LKE	LKE 1 - %	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	LKE	LKE 1 - %	

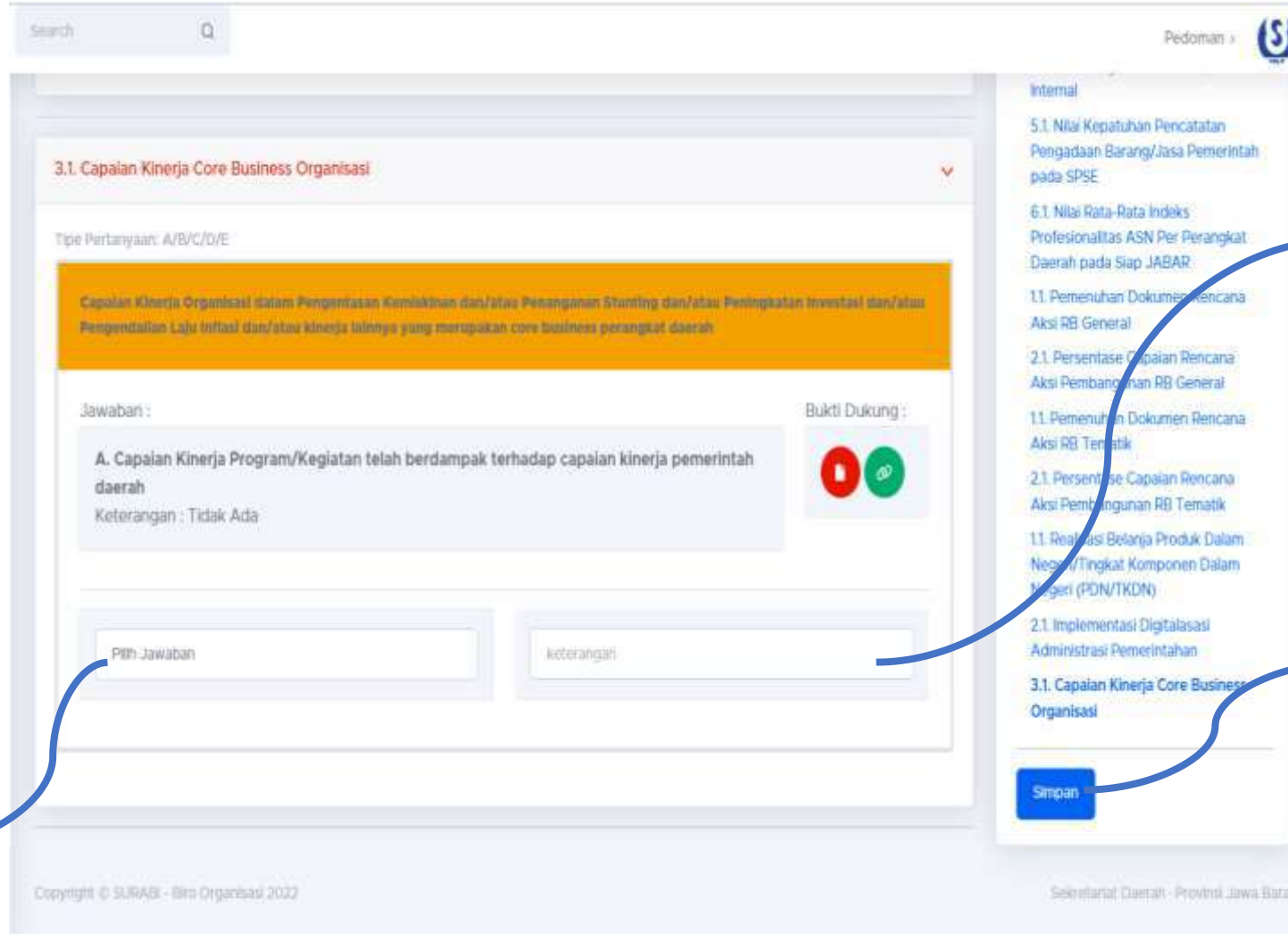
Showing 1 to 10 of 38 entries

< 1 2 3 4 >

Pilih **Perangkat Daerah** pada
Kolom AKSI



Pilih **Indikator** yang di
Evaluasi
Kemudian
Pilih **Jawaban Hasil**
Verifikasi sesuai
dengan **Bukti Dukung**
yang disampaikan
atau sesuai dengan
dokumen resmi yang
di keluarkan oleh
Instansi
Penanggungjawab
Indikator



Kolom Keterangan
diisi dengan
REKOMENDASI
Perbaikan yang
disampaikan
kepada **Perangkat**
Daerah

Pilih **SIMPAN**
apabila selesai
seluruhnya atau
sebagian hasil
verifikasi



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

HATUR NUHUN